

**ANALISIS KUALITATIF PENERAPAN AUDIT BERBASIS RISIKO
DALAM PEMBUATAN PERENCANAAN AUDIT
PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh
IRFAN FEBRIANDI



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2017**

ABSTRACT

Qualitative Analysis of Risk-Based Audit Approach in the Making of Audit Plan at the Representative of Financial and Development Supervisory Board in Lampung Province

**by
Irfan Febriandi**

This research uses qualitative descriptive method that aims to know how the risk-based audit approach applied by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), in this case the Representative of Financial and Development Supervisory Board in Lampung Province, in the making of its audit plan. From the results of interviews with direct informants and literature studies on the implementation of risk-based audit, the Representative of Financial and Development Supervisory Board in Lampung Province has implemented a risk-based approach in the making of its audit plan in accordance with the theory of risk-based audit approach. The Representative of Financial and Development Supervisory Board in Lampung Province always identifies the risks before making its audit plan. This has become a generally accepted and standard practice within the organization of the Representative of Financial and Development Supervisory Board in Lampung Province. These risks are well documented by the Representative of Financial and Development Supervisory Board in Lampung Province to then be used as the basis for consideration in allocating resources in conducting the audit plan. In addition to the risk-based audit planning, the Representative of Financial and Development Supervisory Board in Lampung Province also has a quality control mechanism as well as a tiered review to ensure that the audit plan has been well executed so that the audit runs more effectively and efficiently and produces quality reports.

Keyword : Audit, Risk, Risk-Based Audit, Audit Plan.

ABSTRAK

Analisis Kualitatif Penerapan Audit Berbasis Risiko Dalam Pembuatan Perencanaan Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

**Oleh
Irfan Febriandi**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pendekatan audit berbasis risiko yang diterapkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dalam membuat perencanaan auditnya. Dari hasil wawancara terhadap narasumber yang terlibat langsung dan studi kepustakaan tentang penerapan audit berbasis risiko, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sudah menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pembuatan perencanaan auditnya sesuai dengan teori pendekatan audit berbasis risiko. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung selalu melakukan identifikasi risiko sebelum membuat perencanaan auditnya. Hal ini sudah menjadi praktik yang berlaku umum dan baku di dalam organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Risiko-risiko tersebut didokumentasikan dengan baik oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam mengalokasikan sumber daya dalam melaksanakan audit. Selain perencanaan audit yang telah dibuat berbasis risiko, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga mempunyai mekanisme kendali mutu serta reviu berjenjang untuk memastikan perencanaan audit yang telah dibuat telah dijalankan dengan baik audit berjalan dengan lebih efektif dan efisien serta menghasilkan laporan yang berkualitas.

Kata Kunci: Audit, Risiko, Audit Berbasis Risiko, Perencanaan Audit.

**ANALISIS KUALITATIF PENERAPAN AUDIT BERBASIS RISIKO
DALAM PEMBUATAN PERENCANAAN AUDIT
PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh
IRFAN FEBRIANDI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

SARJANA EKONOMI

**Pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS KUALITATIF PENERAPAN
AUDIT BERBASIS RISIKO DALAM
PEMBUATAN PERENCANAAN AUDIT
PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Irfan Febriandi**

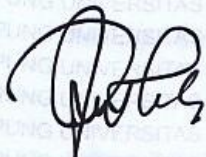
Nomor Pokok Mahasiswa : **1511031172**

Jurusan : **Akuntansi**

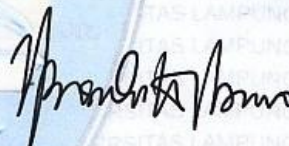
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. **Basuki Wibowo, S.E. M.S.Ak., Akt.**
NIP 19700801 199512 2 001 NIP 19560410 199003 1 001



MENGETAHUI

2. Ketua Jurusan Akuntansi




Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

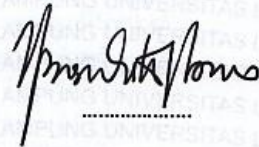
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

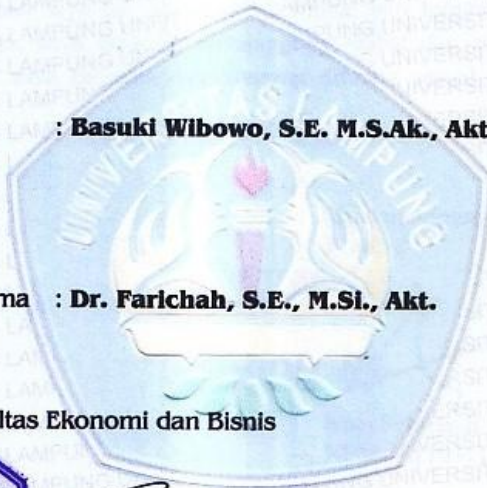
Ketua : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.



Sekretaris : Basuki Wibowo, S.E. M.S.Ak., Akt.



Penguji Utama : Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 September 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Skripsi dengan judul “Analisis Kualitatif Penerapan Audit Berbasis Risiko Dalam Pembuatan Perencanaan Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan saya ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandarlampung, Oktober 2017
Penulis,



Irfan Febriandi
NPM 1511031172

RIWAYAT HIDUP



Irfan Febriandi, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 9 Februari 1991 dari pasangan Bapak Maizal, dan Ibu Ernawati, S.Pd., merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Bustanul Atfal, pada tahun 1996. Dilanjutkan dengan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Labuhan Ratu dan lulus pada tahun 2002. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2005, lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan Diploma III Spesialisasi Akuntansi Pemerintahan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis merintis karir sebagai auditor pelaksana di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua, hingga akhirnya pada tahun 2015 mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan Akuntansi Universitas Lampung melalui program *State Accountability Revitalization Project* (STAR) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan *Asian Development Bank* (ADB).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kualitatif Penerapan Audit Berbasis Risiko Dalam Pembuatan Perencanaan Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih ditemukan banyak kekurangan, karenanya penulis terbuka terhadap berbagai saran dan masukan guna perbaikan di masa depan. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca.

Bandarlampung, Oktober 2017

Irfan Febriandi

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk-Nya lah skripsi berjudul “Analisis Kualitatif Penerapan Audit Berbasis Risiko Dalam Pembuatan Perencanaan Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung” dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Dosen Penguji. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi dan penyempurnaan skripsi.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.
4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi.

5. Bapak Basuki Wibowo, S.E. M.S.Ak., Akt., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi.
6. Ibu Agustina Awan, Bapak Noveriadi, Bapak Sulaiman, beserta seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas segala pelayanan dan bantuan yang diberikan.
7. Keluarga besar yang ada di Bandar Lampung, Jakarta, dan Bandung yang terus menerus memberikan dukungan sejak dari awal perkuliahan.
8. Dina Andriani, terima kasih atas waktu, perhatian dan kasih sayang yang diberikan selama saya menjalani masa perkuliahan.
9. Seluruh rekan-rekan STAR BPKP Batch II Universitas Lampung, terima kasih atas kebersamaan yang diberikan selama ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan dan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bandarlampung, Oktober 2017

Penulis,

Irfan Febriandi

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	xiv
---------------------------	------------

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6

II LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Audit.....	8
2.1.2 Audit Berbasis Risiko.....	10
2.1.3 Perencanaan Audit di BPKP.....	14
2.1.3.1 Perencanaan Strategis.....	14
2.1.3.2 Perencanaan Taktis.....	15
2.1.3.3 Perencanaan Operasional.....	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19

III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.....	20
3.2 Tipe Penelitian.....	21
3.3 Fokus Penelitian.....	21
3.4 Lokasi Penelitian.....	22
3.5 Sumber Data.....	22
3.5.1 Data Primer.....	22
3.5.2 Data Sekunder.....	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.6.1 Studi Kepustakaan.....	23
3.6.2 Wawancara Mendalam.....	23
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	25

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data.....	27
4.2 Hasil Penelitian.....	29
4.3 Pembahasan.....	37

V SIMPULAN DAN SARAN

4.4 Simpulan.....	45
4.5 Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pikir.....	19
2. Konsep audit internal berbasis risiko.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seluruh entitas publik di Indonesia yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kegiatan operasionalnya, berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, diwajibkan membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Laporan Keuangan tersebut nantinya akan diaudit oleh auditor pemerintah sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat (publik). Dalam pelaksanaannya, terdapat 2 (dua) pihak yang melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah tersebut, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal.

APIP sebagai auditor internal, terdiri dari Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya (Itwilkab/kodya), Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprov), Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Intansi pemerintah lainnya, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana BPKP juga bertindak sebagai pembinanya.

APIP mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda sesuai dengan batasan yurisdiksi dan mandat yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan audit, kedua pihak tersebut mempunyai tujuan yang berbeda dimana BPK sebagai auditor eksternal melakukan audit terhadap

laporan keuangan tahunan pemerintah untuk memberikan opini sedangkan APIP melakukan audit keuangan dan audit operasional untuk memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen.

Kepala BPKP menerbitkan Keputusan Kepala BPKP nomor KEP-378/K/1996 tentang Penetapan Berlakunya Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dimana standar tersebut mengatur tentang Standar audit yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) butir standar yang terbagi atas 5 (lima) kategori, yaitu standar umum, standar koordinasi dan kendali mutu, standar pelaksanaan, standar pelaporan, dan standar tindak lanjut. Pada standar koordinasi dan kendali mutu, terdapat butir standar yang menyebutkan bahwa Rencana Induk Pengawasan (RIP) harus disusun oleh setiap APIP dengan memperhatikan Kebijakan Pengawasan Nasional. Butir ini menjelaskan bahwa APIP harus membuat Program Kerja Pengawasan (PKP) yang merupakan alat bantu bagi APIP untuk mencapai hasil pengawasan (audit) yang efektif. PKP ini merupakan masukan yang sangat berguna bagi penyusunan Rencana Induk Pengawasan (RIP) dan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT). Rencana Induk Pengawasan sendiri adalah suatu rumusan strategi umum yang disusun dengan tujuan untuk mengarahkan tugas-tugas pengawasan APIP sehingga mendukung pencapaian arah program, atau sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Rumusan strategi umum ini juga disusun untuk mengarahkan tugas-tugas pengawasan agar sesuai dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang diduga akan terjadi dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu rencana induk ini juga merupakan dasar penyusunan RKPT. Berdasarkan rencana induk tersebut, BPKP membuat

perencanaan audit yang dituangkan kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT inilah yang selanjutnya menjadi acuan BPKP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun. Dalam menyusun PKPT, BPKP sebagai APIP juga menggunakan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh BPKP. Standar ini diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Untuk melaksanakan PKPT tersebut, BPKP mendapatkan porsi APBN sebagai dana operasionalnya dalam melakukan audit intern.

Pada tanggal 12 Mei 2016, Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Instruksi tersebut berdampak pemotongan anggaran operasional pada seluruh Kementerian/Lembaga Negara, salah satunya BPKP, dimana anggaran yang dipotong mencapai Rp19.934.883.100,00. Terbitnya instruksi pemotongan anggaran di tengah-tengah tahun berjalan tersebut, membuat BPKP harus melakukan penyesuaian terhadap perencanaan audit (PKPT) yang telah dibuat pada tahun sebelumnya. Penyesuaian ini tentunya harus tetap mengacu pada rencana induk pengawasan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mempertimbangkan faktor efektifitas dan efisiensi dalam audit, namun tetap mempertahankan kualitas audit.

Dalam dunia auditing, dikenal adanya istilah audit berbasis risiko. Audit berbasis risiko adalah pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit,

sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area-area penting yang berisiko terjadinya penyimpangan atau kecurangan.

Coetzee dan Lubbe (2013) menyatakan bahwa peran auditor internal dalam melakukan mitigasi risiko utama yang mengancam organisasi telah meningkat.

Selain untuk memastikan bahwa semua risiko utama dari organisasi telah ditangani, setidaknya auditor internal turut memastikan bahwa kegiatan bisnis organisasi telah dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, serta memastikan bahwa sumber daya audit internal yang langka digunakan secara optimal. Audit berbasis risiko tidak hanya memusatkan perhatian pada catatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, namun juga memusatkan perhatian pada proses akuntansi, pemilihan dan pencatatan data, pengidentifikasian indikator risiko kegagalan.

Febrina (2011), menyatakan bahwa pelaksanaan audit berbasis risiko akan membuat audit menjadi lebih efektif dan efisien, karena fokus internal audit yang hanya dipusatkan pada area berisiko tinggi. Dengan melakukan pendekatan audit berbasis risiko diharapkan auditor dapat mengidentifikasi risiko kegagalan, kekeliruan, dan kecurangan, serta memberikan rekomendasi bagi *auditee* untuk perbaikan operasinya, memberikan dasar yang kuat bagi tim audit dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan dengan mempertimbangkan risiko salah saji yang terkait dengan risiko kegagalan, kekeliruan, dan kecurangan, serta sebagai kerangka untuk meningkatkan efisiensi (menekan biaya audit dengan mengurangi tes substantif), efektifitas (mengidentifikasi dan fokus pada area-area yang berisiko), dan kualitas audit (menekan kesalahan audit).

Pendekatan audit berbasis risiko ini berkembang pesat karena dianggap sebagai pendekatan yang paling efektif untuk diterapkan dalam kondisi lingkungan bisnis yang selalu berubah-ubah seperti sekarang ini. Salehi and Khatiri (2011) menyatakan bahwa untuk Negara berkembang, audit berbasis risiko akan lebih menguntungkan karena perkembangan teknologi dan kelebihanya dibanding metode audit tradisional, karena itu auditor perlu membuka diri terhadap perkembangan metodologi audit ini dan terbiasa menggunakannya. Audit berbasis risiko sendiri telah diterapkan dalam *International Standards on Auditing (ISA)*, dimana ISA telah diadopsi oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam membuat standar auditing, sehingga saat ini penerapan pendekatan audit berbasis risiko bagi auditor di Indonesia menjadi hal wajib (*mandatory*). Sedangkan untuk audit sektor publik yang dilakukan APIP di Indonesia (khususnya BPKP), audit berbasis risiko sudah diatur didalam standar audit APIP, namun belum diketahui bagaimana bentuk penerapannya dalam pembuatan perencanaan audit yang dilakukan BPKP.

Sehubungan dengan fenomena pemotongan anggaran pada BPKP yang telah disebutkan sebelumnya, penerapan pendekatan audit berbasis risiko tentunya dapat membantu BPKP dalam melakukan penyesuaian perencanaan program pengawasan tahunannya. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kualitatif Penerapan Audit Berbasis Risiko Dalam Pembuatan Perencanaan Audit Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung”**. Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap

dapat memperoleh gambaran mengenai penerapan audit berbasis risiko dalam audit sektor publik yang dilakukan oleh APIP.

1.2 Rumusan Masalah

Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sudah menerapkan pendekatan audit berbasis risiko dalam pembuatan perencanaan auditnya?
2. Bagaimanakah penerapan pendekatan audit berbasis risiko dalam pembuatan perencanaan audit yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pendekatan audit berbasis risiko yang diterapkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dalam membuat penerapan perencanaan auditnya selama tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan bisa dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, penelitian ini dapat dijadikan alat evaluasi untuk melihat penerapan pendekatan audit berbasis risiko dalam pembuatan perencanaan auditnya.

2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan informasi tentang sejauhmanakah pendekatan audit berbasis risiko yang diterapkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di bidang audit sektor publik.
3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Audit

Audit dalam arti luas adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk yang dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten, objektif dan independen yang disebut auditor yang bertujuan untuk melakukan verifikasi bahwa objek dari audit tersebut telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Menurut Mulyadi (2002) audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai kepentingan.

Menurut Agoes (2004) audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan, bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Arens (2011) audit adalah akumulasi dan evaluasi dari bukti-bukti yang menyajikan informasi untuk dinilai dan dilaporkan bagaimana tingkat

korespondensi antara informasi-informasi tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan independen.

Audit sendiri dapat dibagi ke beberapa jenis yaitu, audit keuangan, audit operasional dan audit tujuan tertentu. Ketiga jenis audit tersebut mempunyai tujuan audit yang berbeda dimana audit keuangan untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen, audit operasional untuk pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur operasi standar dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan (3E), dan audit tujuan tertentu yang merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar audit keuangan dan pemeriksaan kinerja. Hasil dari audit tujuan tertentu adalah kesimpulan.

Meskipun mempunyai tujuan yang berbeda ketiga jenis audit tersebut mempunyai tahapan audit yang sama yaitu, tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Arens (2011) menyatakan bahwa audit dimulai dengan tahapan perencanaan, dimana auditor membuat perencanaan auditnya secara menyeluruh, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan audit, dan diakhiri dengan tahapan pelaporan. Masing-masing tahapan audit tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Teori audit sendiri bersifat dinamis, dimana teori audit tersebut ikut berkembang sesuai dengan meningkatnya kebutuhan akan hasil pelaksanaan audit. Perkembangan teori audit tersebut nantinya akan melahirkan

pendekatan-pendekatan ataupun metodologi yang baru dalam pelaksanaan audit.

2.1.2 Audit Berbasis Risiko

Dalam sejarahnya, ilmu audit telah beberapa kali mengalami perubahan pendekatan, mulai dari pendekatan audit berbasis dokumen, audit berbasis neraca saldo, audit berbasis sistem, sampai pada akhirnya ke audit berbasis risiko. Pendekatan tersebut muncul tidak lain karena munculnya masalah-masalah baru yang berhubungan dengan area bisnis, sehingga ilmu audit dituntut untuk mengalami perubahan demi mempertahankan kualitas audit. Mengubah pendekatan audit secara relevan demi mempertahankan kualitas audit, tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan audit.

Galloway (2010) menyatakan bahwa audit berbasis risiko adalah audit dimana tujuan audit dan perencanaan audit didasarkan oleh filosofi penilaian risiko. Audit berbasis risiko adalah suatu metodologi audit yang digunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola di dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkatan korporasi. Nasution (2016) menyatakan bahwa pendekatan audit berbasis risiko bukan berarti meninggalkan pendekatan audit konvensional yang dijalankan oleh lembaga audit internal yang sudah berjalan selama ini melainkan pendekatan malah membawa perubahan dalam metodologi audit yang dapat dijalankan oleh auditor internal dalam pelaksanaan penugasan auditnya

dengan cara peningkatan pemahaman atas risiko yang harus diantisipasi, dihadapi, atau dialihkan oleh manajemen guna mencapai tujuan. Salehi dan Khatiri (2011) menyatakan bahwa pendekatan audit berbasis risiko, berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit dengan menggeser fungsi dari kegiatan kebijakan menjadi kebijakan yang berkontribusi secara efektif dalam mengelola risiko dan mencapai tujuan organisasi yang lebih luas.

Perbedaan pendekatan audit berbasis risiko dengan pendekatan audit konvensional adalah pada metodologi yang digunakan dimana auditor mengurangi perhatian pada pengujian transaksi individual dan lebih berfokus pada pengujian atas sistem dan proses bagaimana manajemen mengatasi hambatan pencapaian tujuan, serta berusaha untuk membantu manajemen mengatasi (mengalihkan) hambatan yang dikarenakan faktor risiko dalam pengambilan keputusan.

Aspek-aspek yang perlu dipahami auditor dalam melakukan pendekatan berbasis risiko adalah sebagai berikut: (1) dalam menerapkan audit berbasis risiko, auditor perlu mengidentifikasi wilayah atau area yang memiliki risiko yang menghambat pencapaian tujuan manajemen. Misalnya dalam audit keuangan, risiko salah saji yang besar atau tinggi pada penyajian laporan keuangan. Wilayah atau area yang memiliki tingkat risiko yang tinggi tersebut akan memerlukan pengujian yang lebih mendalam; (2) auditor dapat mengalokasikan sumber daya auditnya berdasarkan hasil

identifikasi atas kemungkinan dan dampak terjadinya risiko. Wilayah berisiko rendah menjadi prioritas akhir alokasi sumber daya audit.

Sawyer et al (2005) menyatakan bahwa konsep audit berbasis risiko secara tradisional bermula dari observasi dan analisis kontrol, kemudian berlanjut ke penentuan risiko yang berkaitan dengan operasi, dan akhirnya ke penentuan apakah aktivitas ini sesuai dengan tujuan-tujuan organisasi.

Beberapa ahli menyatakan bahwa pendekatan ini tidak tepat karena adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan terlebih dahulu, tujuan merupakan dasar operasi dan tidak selalu berbentuk nyata, bisa bersifat fleksibel dan seharusnya berorientasi ke masa depan. Para ahli tersebut merekomendasikan sebuah pendekatan yang mempertimbangkan terlebih dahulu tujuan organisasi yang ditetapkan dan kemudian menentukan risiko melalui identifikasi, pengukuran, dan penempatan prioritas, dan akhirnya melakukan manajemen risiko dengan cara mengendalikan dan menerima risiko, menghindari atau mendiversifikasi risiko, atau membagi dan mentransfer bagian-bagian risiko ke unit-unit lainnya. Lebih lanjut lagi, Sawyer et al (2005) juga menyatakan bahwa konsep manajemen risiko ini telah semakin diterima karena risiko tidak dapat dihindarkan di semua jenis operasi dan adanya kebutuhan untuk mengakomodasikannya melalui berbagai pilihan aktivitas. Pilihan-pilihan tersebut mencakup: (1) kontrol aktivitas organisasional untuk mengurangi elemen-elemen risiko baik dari segi besaran maupun jumlah; (2) penerimaan risiko dengan memperbolehkan risiko kehati-hatian yang diperlukan untuk kemajuan dan

keuntungan; (3) penghindaran risiko yang melibatkan perancangan ulang proses bisnis untuk mengubah pola risiko; (4) pendiversifikasian risiko dengan menyebarkan total risiko ke operasi-operasi yang terpisah. Contohnya adalah menggunakan berbagai pemasok untuk bahan baku yang penting; (5) pembagian dan pemindahan risiko dengan melibatkan perjanjian kontraktual dengan pihak ketiga untuk menerima sebagian atau semua risiko. Contohnya adalah asuransi.

Menurut Tuanakotta (2013), beberapa manfaat dari suatu audit berbasis risiko adalah sebagai berikut: (1) fleksibilitas waktu; (2) upaya tim audit terfokus pada area kunci; (3) prosedur audit terfokus pada risiko; (4) pemahaman atas pengendalian internal; (5) komunikasi tepat waktu.

Menurut Tuanakotta (2013), lingkup pemahaman yang diperlukan auditor untuk mengidentifikasi risiko, dicakup dalam enam area inti atau enam sumber risiko, yaitu: (1) faktor eksternal; (2) sifat entitas; (3) kebijakan akuntansi; (4) tujuan dan strategi entitas; (5) pengukuran atau reviu kinerja keuangan; (6) pengendalian internal.

Menurut Romney dan Steinbart (2004), terdapat empat tahap dalam audit berbasis risiko, yaitu: (1) tentukan ancaman-ancaman; (2) identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman; (3) evaluasi prosedur pengendalian; (4) evaluasi kelemahan (kesalahan dan ketidakberaturan yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian).

2.1.3 Perencanaan Audit di BPKP

Perencanaan audit adalah suatu proses identifikasi tentang apa yang harus dikerjakan dalam suatu audit, oleh siapa, kapan atau berapa lama dan berapa biayanya. Tujuan umum perencanaan audit di BPKP adalah untuk memenuhi persyaratan standar profesional yang termuat dalam standar audit sehingga para pengguna jasa audit dapat memperoleh layanan yang bermutu.

Perencanaan audit di BPKP merupakan bagian dari kegiatan manajerial pengawasan. Perencanaan pengawasan diharapkan menghasilkan perencanaan jangka panjang yang dituangkan kedalam suatu rencana pengawasan lima tahunan dan perencanaan operasional yang dituangkan kedalam suatu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Elim (2010) menyatakan perencanaan audit di BPKP meliputi 3 tahapan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis merupakan tahap perencanaan tertinggi, paling luas dan bersifat strategis, kemudian diikuti oleh perencanaan taktis dan perencanaan operasional.

2.1.3.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis di BPKP mengikuti pola yang merupakan tahapan kegiatan yang paling kualitatif sampai dengan yang paling teknis, kuantitatif dan sangat rinci. Secara umum perencanaan strategis meliputi tahap berikut:

- a. Menetapkan tujuan secara menyeluruh.

- b. Menentukan tindakan-tindakan jangka panjang dengan mengantisipasi dampak kekuatan lingkungan masa mendatang.
- c. Mengidentifikasi sumber daya dan metode-metode yang tersedia untuk melaksanakan keputusan-keputusan
- d. Mengevaluasi hasil pekerjaan dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan strategis tersebut dituangkan kedalam suatu dokumen kebijakan tertulis (dalam kurun waktu 5 tahun) yang bersifat dinamis dan fleksibel, artinya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi. Elim (2010) menyatakan perencanaan strategis sebagai rencana jangka panjang disusun selaras dengan rencana pembangunan nasional jangka menengah/panjang dan kebijakan pengawasan nasional.

Perencanaan strategis ini merupakan rencana organisasi, bukan rencana pimpinan organisasi seperti yang sering disalah persepsikan oleh sebagian institusi pemerintah.

2.1.3.2. Perencanaan taktis

Perencanaan taktis disusun untuk kurun waktu satu tahun dan bersifat fleksibel guna mengantisipasi setiap perubahan. Dalam praktiknya perencanaan taktis di BPKP dikenal sebagai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Sebelum tahun anggaran berakhir, BPKP berkewajiban menyusun rencana Usulan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RUKPT)

untuk tahun berikutnya. Data yang digunakan dalam menyusun RUKPT sebagian berasal dari kebijakan pengawasan. Setelah dibahas pada tingkat manajemen dan dikoordinasikan dengan APIP lainnya, selanjutnya RUKPT disahkan menjadi PKPT. PKPT memuat data/informasi sebagai berikut:

- a. Identitas auditan
- b. Anggaran biaya
- c. Sasaran audit
- d. Periode audit
- e. Jumlah auditor
- f. Waktu mulai audit
- g. Waktu penerbitan laporan hasil audit

Selanjutnya pimpinan dapat memilah tingkat risiko audit pada setiap penugasan audit sebagai salah satu faktor penting untuk menentukan skala prioritas dalam penyusunan PKPT.

Pembandingan dengan pengalaman audit tahun sebelumnya berperan cukup penting dalam menambah atau mengurangi jumlah penugasan audit sesuai tingkat risikonya

2.1.3.3. Perencanaan Operasional

Perencanaan taktis selanjutnya dirinci kedalam beberapa penugasan audit yang dikenal sebagai perencanaan operasional. Dalam pembuatan perencanaan penugasa audit ini, pimpinan akan memperhatikan beberapa faktor berikut:

- a) Penetapan waktu
Frekuensi penugasan audit dan kemungkinan pelampauan waktu audit harus dipertimbangkan.
- b) Lokasi auditan
Lokasi auditan menentukan jumlah biaya audit yang diperlukan.
- c) Ketersediaan auditor (sumber daya manusia)
Beberapa penugasan audit mungkin akan membutuhkan keahlian khusus auditor, misalnya audit berbasis komputer
- d) Kesibukan auditan
Tingkat kesibukan auditan menjadi perhatian khusus, misalnya saat pembayaran gaji, waktu penyusunan laporan keuangan dan kegiatan operasional yang sedang memuncak.
- e) Pola kerja
Tingkat kesibukan auditor diselaraskan dengan permintaan audit diluar PKPT yang berasal dari pihak-pihak berkepentingan, misalnya Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.
- f) Informasi yang diterima
Pimpinan dapat memberi penugasan audit tertentu apabila terdapat informasi baik yang terduga atau tidak terduga dari pihak-pihak tertentu yang memerlukan penanganan khusus,

misalnya audit investigasi atas kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.

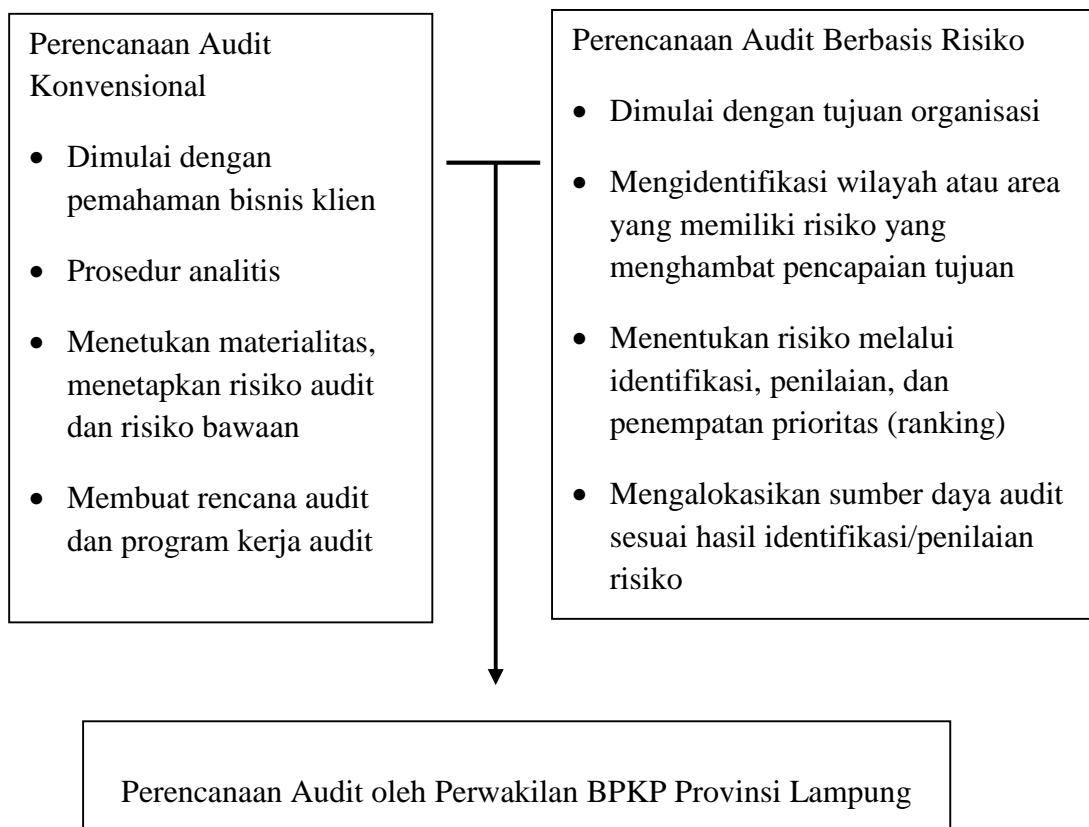
Penugasan audit atau perencanaan operasional tersebut, selanjutnya akan dilaksanakan oleh tim audit yang terdiri dari supervisor, ketua tim dan anggota tim. Tim audit akan membuat perencanaan audit individu atas penugasan audit yang menjadi tugasnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Bell et al. (2005) dan PCAOB (2007) menyatakan bahwa audit berbasis risiko dapat mengarah kepada peningkatan audit yang lebih efektif dan efisien.
2. Febrina (2011) menyatakan bahwa pelaksanaan audit berbasis risiko akan membuat lebih efektif dan efisien, karena fokus internal audit yang hanya dipusatkan pada area berisiko tinggi.
3. Salehi and Khatiri (2011) menyatakan bahwa untuk negara berkembang, audit berbasis risiko akan lebih menguntungkan karena perkembangan teknologi dan kelebihanannya dibanding metode audit tradisional, karena itu auditor perlu membuka diri terhadap perkembangan metodologi audit ini.
4. Coetzee dan Lubbe (2013) menyatakan bahwa peran auditor internal dalam melakukan mitigasi risiko utama yang mengancam organisasi telah meningkat. Selain untuk memastikan bahwa semua risiko utama dari organisasi telah ditangani, setidaknya auditor internal turut memastikan bahwa kegiatan bisnis organisasi telah dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, serta memastikan bahwa sumber daya audit internal yang langka digunakan secara optimal.

5. Megasari dan Ngumar (2016) menyatakan bahwa dalam audit berbasis risiko, auditor internal harus mendahulukan pengujian dan observasi pada aktivitas yang mempunyai risiko signifikan. Risiko ini dapat timbul dari faktor eksternal maupun internal.
6. Kumalasari dan Sapari (2016) menyatakan bahwa dengan audit berbasis risiko, maka semakin besar risiko semakin besar perhatian yang harus diberikan sehingga dapat meyakinkan bahwa kecukupan risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko yang ditetapkan perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Lincoln dalam Neuman (2016), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada proses dan pemaknaan atas realitas social yang tidak diuji dan diukur secara ketat dari segi kuantitas, ataupun frekuensi. Fokus dari penelitian kualitatif adalah menjelaskan bagaimana gejala sosial dibentuk dan diberi makna.

Menurut Neuman (2016), terdapat 7 langkah yang harus dilakukan dalam proses penelitian kualitatif. Pertama, mengetahui inti permasalahan. Dalam penelitian ini, inti permasalahan adalah, apakah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sudah menerapkan pendekatan audit berbasis risiko dalam pembuatan perencanaan auditnya, serta bagaimana penerapan yang dilakukannya. Kedua, mengadopsi perspektif penelitian. Penelitian ini menggunakan prespektif perbandingan, dimana peneliti membandingkan teori pendekatan audit berbasis risiko dengan kondisi nyata didalam obyek penelitian. Ketiga, melakukan desain penelitian. Keempat, mengumpulkan data penelitian. Kelima, menganalisa data penelitian. Keenam, menafsirkan data penelitian. Ketujuh, memberitahu orang lain.

Pendekatan penelitian ini dianggap relevan untuk dipakai karena dapat menggambarkan keadaan obyek penelitian secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan tipe kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atas penerapan audit berbasis risiko dalam pembuatan perencanaan audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

Penelitian ini sengaja menggunakan BPKP sebagai obyek penelitian, dimana peneliti adalah salah satu pegawai BPKP yang pernah terlibat langsung dalam pembuatan perencanaan audit, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata, karena peneliti telah mengalami langsung proses pembuatan perencanaan audit di BPKP.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terbatas pada proses pembuatan perencanaan audit di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan pada lima pengawasan bidang di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yaitu, Pengawasan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat, Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), Pengawasan Bidang Akuntan Negara, Pengawasan Bidang Investigasi dan Pengawasan Bidang Program, Pelaporan, dan Pembinaan APIP.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), namun karena BPKP adalah instansi pemerintah yang mempunyai perwakilan di setiap provinsi, peneliti secara khusus memilih

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai obyek penelitian karena alasan kemudahan akses data.

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder, yaitu

3.6.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer adalah dokumen perencanaan audit yang dibuat oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung selama tahun 2016 dan hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perencanaan audit di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung selama tahun 2016 yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dan para Koordinator Pengawasan Bidang di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari pihak lain (pihak eksternal). Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari bahan pustaka dan literatur, seperti buku-buku, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang penerapan audit berbasis risiko.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan 2 teknik untuk pengumpulan data, yaitu:

3.6.1 Studi Kepustakaan

Kegiatan mencari data sekunder melalui sumber buku-buku, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu tentang penerapan audit berbasis risiko.

3.6.2 Wawancara Mendalam

Menurut Neuman (2016) wawancara mendalam merupakan sebuah hasil produksi yang dilakukan bersama antara peneliti dengan anggota.

Anggotanya merupakan peserta aktif yang wawasan, perasaan dan kerjasama merupakan bagian terpenting dari proses diskusi dalam mengungkapkan makna subjektif. Masih menurut Neuman (2016), ciri-ciri wawancara mendalam adalah:

- a. Percakapan awal dan akhir tidak jelas arahnya. Kesimpulan hasil wawancara dapat diambil kemudian.
- b. Urutan pertanyaan secara acak. Hal ini dapat disesuaikan dengan orang-orang dan situasi tertentu.
- c. Para pewawancara menunjukkan minat dalam tanggapan, yang mendorong elaborasi.
- d. Hal ini seperti percakapan ramah, tetapi dengan pertanyaan wawancara lebih mendalam.
- e. Hal ini dapat terjadi dalam pengaturan porlasi atau dengan orang lain di daerah tapi lebih bervariasi.
- f. Hal ini diselingi dengan lelucon, cerita, hiburan dan anekdot yang telah dicatat.

- g. Dibuka dan diakhiri dengan pertanyaan umum dan probe sering.
- h. Pewawancara dan anggota bersama-sama mengontrol kecepatan dan arah wawancara.
- i. Konteks sosial wawancara dicatat dan dianggap penting untuk menafsirkan makna tanggapan.
- j. Pewawancara menyesuaikan diri dengan norma-norma anggota dan penggunaan bahasa.

Wawancara mendalam akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perencanaan audit dan skema prosedur audit di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sealam tahun 2016, pihak-pihak tersebut adalah:

- a. Sally Salamah (Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung).
- b. Hieronymus S. P. (Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat).
- c. John Z. Nasaputra (Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah).
- d. Sudiro (Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara).
- e. Api Ahmad Rochjadi (Koordinator Pengawasan Bidang Program, Pelaporan, dan Pembinaan APIP).
- f. Asra Yadi (Auditor Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung).
- g. Albi Gultom (Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung).
- h. Andreas Selamat Ranto Nababan (Auditor Pertama pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung).

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, sehingga pertanyaannya bersifat luwes dan terbuka, namun tetap berfokus pada isu penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pada dasarnya penelitian dengan pendekatan kualitatif sama halnya dengan pendekatan kuantitatif dimana penelitian tersebut mengubah data empiris menjadi suatu kesimpulan. Validitas dalam penelitian kualitatif akan meningkat seiring dengan jalannya penelitian. Menurut Neuman (2016) Reliabilitas dan validitas dalam penelitian kualitatif dapat dicapai melalui klaim kebenaran yang masuk akal dan dimengerti oleh banyak orang.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya peneliti akan mengolah data tersebut dengan cara:

- a. Inventarisasi data, yaitu menatausahakan data dari hasil studi kepustakaan dan wawancara mendalam.
- b. Menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu dengan cara memilah data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara mendalam untuk menentukan data mana yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Penyajian data, yaitu penyajian data yang relevan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian ini dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tabel, bagan, dan kumpulan kalimat guna menggabungkan informasi kedalam suatu bentuk terpadu dan mudah dibaca, dengan demikian peneliti dapat kesimpulan yang tepat

- d. Penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengkajian terhadap data yang telah disajikan dibandingkan dengan data pembanding teori tertentu dari hasil studi kepustakaan. Pengkajian tersebut dilakukan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif penerapan audit berbasis risiko dalam pembuatan perencanaan audit di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari semua jenis audit yang dilakukan, Perwakilan BPKP sudah menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pembuatan perencanaan auditnya.
2. Dalam pembuatan perencanaan strategis, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sudah menerapkan pendekatan audit berbasis risiko dengan memperhitungkan risiko-risiko rencana pembangunan dan kebijakan pengawasan nasional dan regional dalam menetapkan Rencana Strategisnya.
3. Dalam pembuatan perencanaan taktis, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sudah menerapkan pendekatan audit berbasis risiko, terlihat dari proses pembuatan dokumen PKPT dimana Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sudah melakukan identifikasi risiko untuk setiap jenis kegiatannya (termasuk audit) dan risiko-risiko yang telah diidentifikasi tersebut sudah terdokumentasi dengan baik.
4. Perencanaan operasional Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sudah dibuat dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko. Terdapat beberapa faktor risiko yang menjadi pertimbangan dalam membuat perencanaan

operasional diantaranya adalah penetapan waktu, lokasi auditan, ketersediaan auditor (sumber daya manusia), kesibukan auditan, pola kerja, serta informasi lain yang diterima dari pihak-pihak tertentu. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga mempunyai mekanisme kendali mutu serta revidi berjenjang untuk memastikan program kerja audit berbasis risiko tersebut berjalan dengan baik audit berjalan dengan lebih efektif dan efisien serta menghasilkan laporan yang berkualitas.

5. Penerapan pendekatan audit berbasis risiko dalam pembuatan perencanaan audit di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori pendekatan audit berbasis risiko.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa:

1. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sudah menerapkan pendekatan audit berbasis risiko dalam pembuatan perencanaannya.
2. Penerapan pendekatan tersebut dilihat sudah cukup baik dan sesuai dengan teori pendekatan audit berbasis risiko, sehingga peneliti menyarankan agar kondisi ini tetap dijaga. Karena perencanaan auditnya sudah menggunakan pendekatan audit berbasis risiko, sebaiknya tahap pelaksanaan dan pelaporan audit juga menerapkan pendekatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik Edisi III*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Arens, Alvin A & Loebbecke, James K. 2011. *Auditing, an Integrated Approach Seventh Edition*. Prentice-Hall, Inc. New Jersey.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2007. *Audit Berpeduli Risiko*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan. Jakarta.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 1996. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-378/K/1996 tentang Penetapan Berlakunya Standar Audit Pegawai Fungsional Pemerintah.
- Bell TB, Peecher ME, Solomon I. 2005. *The 21st Century Public Company Audit. Conceptual elements of KPMG's Global Audit Methodology*. University of Illinois at Urbana-Champaign.
- Bryson, JO. 1990. *Effective Library and Information Centre Management*. Gower. England.
- Coetzee, Philna dan Lubbe, Dave. 2013. Improving the Efficiency and Effectiveness of Risk-Based Internal Audit Engagements. *Department of Auditing's Journal in University of Pretoria*.
- Elim, John. 2010. *Perencanaan Penugasan Audit*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan. Jakarta.
- Griffiths, David M. 2013. *Risk Based Internal Auditing An Introduction*.
- Galloway, David. 2010. *Internal Auditing: A Guide for the New Auditor*. The IIA Research Foundation.
- Neuman, W. Lawrence. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Jakarta. Indeks
- Kahar, Irawaty A. 2008. Konsep Kepemimpinan dalam Perubahan Organisasi (Organizational Change) pada Perpustakaan Perguruan Tinggi. *Pustaka: Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi 4: 1*.
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2008. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2009. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit-Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PKMA-APIP).

Kumalasari, Intan Asri dan Sapari. 2016. Risk-Based Audit atas Penjualan (Studi Kasus Pada PT. United Motors Centre). *Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi* 5 : 5.

Megasari, Ita dan Ngumar, Sutjipto. 2016 Audit Berbasis Risiko dalam Pengujian atas Pengendalian Intern pada Siklus Pendapatan. *Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi* 3 : 11.

Mihret, Dessalegn Getie and Yismaw, Aderajew Wondim. 2007. Internal audit effectiveness : an Ethiopian public sector case study. *Managerial Auditing Journal* 22 : 470-484.

Mulyadi. 2002. *Auditing Edisi keenam*. Salemba Empat. Jakarta.

Nasution, Emharri Manda. 2016. *Audit Berbasis Risiko*. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Jakarta

PCAOB. 2007. *Report on the Second-year Implementation of Auditing Standard No. 2: An Audit of Internal Control over Financial Reporting Performed in Conjunction with an Audit of Financial Statements*. PCAOB. Washington D.C.

Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara

Republik Indonesia. 2016. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Romney, M. B dan P. J. Steinbart. 2004. *Accounting Information Systems (Sistim Informasi Akuntansi)*, Buku Satu. Edisi Kesembilan. Salemba Empat. Jakarta.

Salehi, Mahdi and Khatiri, Mohammad. 2011. A study of risk based auditing barriers: Some Iranian evidence. *African Journal of Business Management* 5: 3923-3934.

Sawyer, B. Lawrence, Mortimer A. Dittenhofer, dan James H. Scheiner. 2003. *Internal Auditing: The Practice of Modern Internal Auditing*. Edisi kelima. The Institute of Internal Auditors. USA.

Tuanakotta, T. M. 2013. *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing) Edisi Pertama*. Salemba Empat. Jakarta.

Widodo, Retno Agung dan Suryono, Bambang. 2014. Risk Based Audit pada Siklus Pendapatan dan Siklus Pengeluaran pada PT "X". *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 3: 9.